



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD dan RENSTRA. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadikan dokumen ini sebagai Rencana didalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2024, dan semoga memberikan manfaat bagi semua

Palu, 21 JUNI 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUTY ZARFIANA, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19650211 199006 2 001



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Kata Pengantar.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN,	26
3.1. Tujuan	26
3.2. Sasaran	26
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1. Program dan Kegiatan.....	30
4.2. Indikator Kinerja Utama	34
4.3. Realisasi.....	36
BAB V PENUTUP	50
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.....	50
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	50
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	51



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Upaya Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara bertahap setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi



dari dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pemenuhan maksud tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran



- Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
19. dengan Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.



25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126):
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana baik Pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana secara berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan



1.8. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD

2.7. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN,

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

4.1 Tabel Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

5.3. Rencana tindak lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Kebijakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Dimana gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah secara garis besar bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahu



Tabel. 2.1

Tabel Evaluasi Renja Tahun Sebelumnya
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIA TAN (SUB OUTPUT)	TARGET KINERJA		ANGGARAN APBD PERUBAHAN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2023 PERSENTASE CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2023
			K			K	RP	
					RP	K	RP	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18.720.642.625		17.693.374.511	94,51%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	%	7.582.121.863			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	29.965.650	100%	29.965.650	99.30%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokum en	1.916.900	1 Doku men	1.916.900	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dokum en	14.999.850	1 Doku men	14.999.850	100

TAHUN 2024

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	2	Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	10.048.900	1 Laporan	10.048.900	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100	%	7.799.843.139	100%	6.862.574.798	87.98%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	95	Orang	6.835.293.139	95	5.934.568.798	86.82%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	Dokumen	919.550.000	2 Dokumen	883.006.000	96.03%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	%	337.639.100	100 %	337.429.600	99.94%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	229.586.100	2 Paket	229.469.600	99.98%
				Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	Dokumen	53.035.000	1 Dokumen	52.960.000	99.89%



TAHUN 2024

				Bimbingan Teknis Implementasi pengaturan Perundang-undangan.	Jumlah org yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi pengaturan Perundang-undangan.	4	Orang	55.000.000	4 Orang	55.000.000	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100	%	3.685.619.608	100%	3.683.909.147	99.95%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	670.814.594	1 Paket	670.536.900	99.96%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistic kantor yang di sediakan	3	paket	1.117.962.564	3 Paket	1.116.730.000	99.89%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	Paket	78.646.600	2 Paket	78.646.600	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	laporan	1.818.195.850	13 Lapora n	1.817.995.647	99.99%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.522.700.000	100%	1.511.499.000	99.26%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara	3	unit	1.522.700.000	3 Unit	1.060.799.000	69.67%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa	100	%	645.575.505	100%	645.557.512	99.53%



TAHUN 2024

					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Lapora n	470.005.500	1 Lapora n	466.994.512	99.39%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	1	Lapora n	175.570.005	1 Lapora n	175.563.000	100%
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Kab/Kota yang menyusun GDPK	1	Kab/K ota	1.195.602.550	1 Kab/K ota	1.177.076.788	98.45%
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2	Dok	562.811.800	2 Doku men	552.272.524	98.13%
					Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	Lapora n	345.517.600	1 Lapora n	342.708.494	99.19%
					Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK dan sector lain.	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah data kependudukan di kampung Kb .	1	dokum en	217.294.200	1 Doku men	209.564.030	96.44%
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	3	Dok	632.790.750	3 Dok	624.804.264	98.74%

TAHUN 2024

				Pemetaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Pemetaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	dokumen	238.000.000	1 Dokumen	232.034.454	97.49%
				Penyusunan Profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	dokumen	229.051.250	1 dokumen	297.030.310	99.32
				Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1	Dokumen	95.739.500	1 dokumen	95.739.500	100%
				▪ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	100	%	1.029.056.300	100%	1.019.633.600	99.08%
				▪ Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio Akseptor KB	4	Dokumen	541.266.900	4 Dokumen	537.910.200	99.38%
				▪ Penggunaan Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	Jumlah laporan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	77	laporan	115.281.850	77 Laporan	115.103.550	99.85%
				▪ Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	14	Dokumen	137.849.150	14 Dokumen	134.670.750	97.69%

TAHUN 2024

				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan strategi Operasional promosi dan konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal 	Jumlah dokumen hasil pengembangan strategi Operasional promosi dan konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	14	dokumen	158.297.700	14 Dokumen	158.297.700	100%
				<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan promosi dan konseling kesehatan Reproduksi 	Jumlah dokumen/laporan	14	Laporan	129.838.200	14 Dokumen	129.838.200	100%
				<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 	Angka Pemakaian Kontrasepsi / mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49(Persen)	100	%	487.789.400	100%	481.723.400	98.76%
				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Dokumen	299.519.750	77 Dokumen	297.326.710	99.27%
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Organisasi	188.269.650	77 Organisasi	184.396.690	97.94%
				<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	%	2.078.568.800	100%	2.033.041.207	97.81%
				<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 	Jumlah organisasi/ Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan	100	%	1.592.996.400	100%	1.563.284.275	98.13%



TAHUN 2024

				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
				<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	175.796.000	1 Dokumen	160.597.025	91.35%
				<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13	Dokumen	211.744.850	13 Dokumen	744.850.000	100%
				<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	500	Orang/kelompok	279.086.000	500 orang	274.386.000	98.32%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1	Laporan	156.765.900	1 Laporan	156.365.900	99.74%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/ R) 	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	50	Organisasi	48.512.350	50 Organisasi	48.512.350	100%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokumen	41.190.000	1 Dokumen	41.190.000	100%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Advokasi , Sosialisasi, dan Promosi IPK 	Jumlah Laporan Hasil Advokasi , Sosialisasi, dan Promosi IPK	13	Laporan	545.370.050	13 Laporan	51.920.050	93.77%

TAHUN 2024

				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	jumlah kelompok masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan, bimbingan 1000 HPK	13	Dokumen	48.539.950	13 Dokumen	44.839.950	92.38%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyediaan Sarana penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	unit	448.547.000	1 Unit	448.283.850	99.94%
				<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 		100	%	485.572.400	100%	469.756.932	96.74%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Pengelola Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PKKS) 	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Dokumen	88.520.200	1 Dokumen	88.520.200	100%
				<ul style="list-style-type: none"> Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	laporan	81.868.100	1 Laporan	77.628.100	94.82%
				<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga 	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1	Laporan	47.201.000	1 Laporan	44.425.532	94.12%
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	1	Dokumen	240.682.350	1 Dokumen	231.882.350	96.34%



TAHUN 2024

					dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						
					<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB 	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	Dokumen	27.300.750	1 Dokumen	27.300.750	100%



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PERANGKAT DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2023

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Capaian Sulteng	Capaian Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	64	52,05		
2	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Persen	1,50	1,22		
3	Meningkatnya Ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian keluarga	Persen	52,50	59,99	61,43	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target	Capaian Sulteng	Capaian Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Angka Prevalensi Contracepsi Modern (CPR)	Persen	60	67,78	60,4	
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2,55	2,16	2,14	
3	Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need)	Persen	13,99	14,6	11,5	
4	Meningkatnya Pemakaian Metode Contraespsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	19	21,04	23,6	
5	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja (ASFR)	Persen	36/1000	33,5/1000	19,7/1000	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.



Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Gambaran Pelayanan kinerja OPD secara garis besar sesuai dengan target capaian kinerja RENTRA OPD tahun 2021-2026. Untuk terwujudnya capaian sasaran kinerja program dan kegiatan pelayanan OPD yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD perlu dilakukan pengkajian secara komperhensif sehingga dapat terukur pencapaian indikator kinerja yang dapat mendukung tugas dan fungsi pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;



6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.



2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

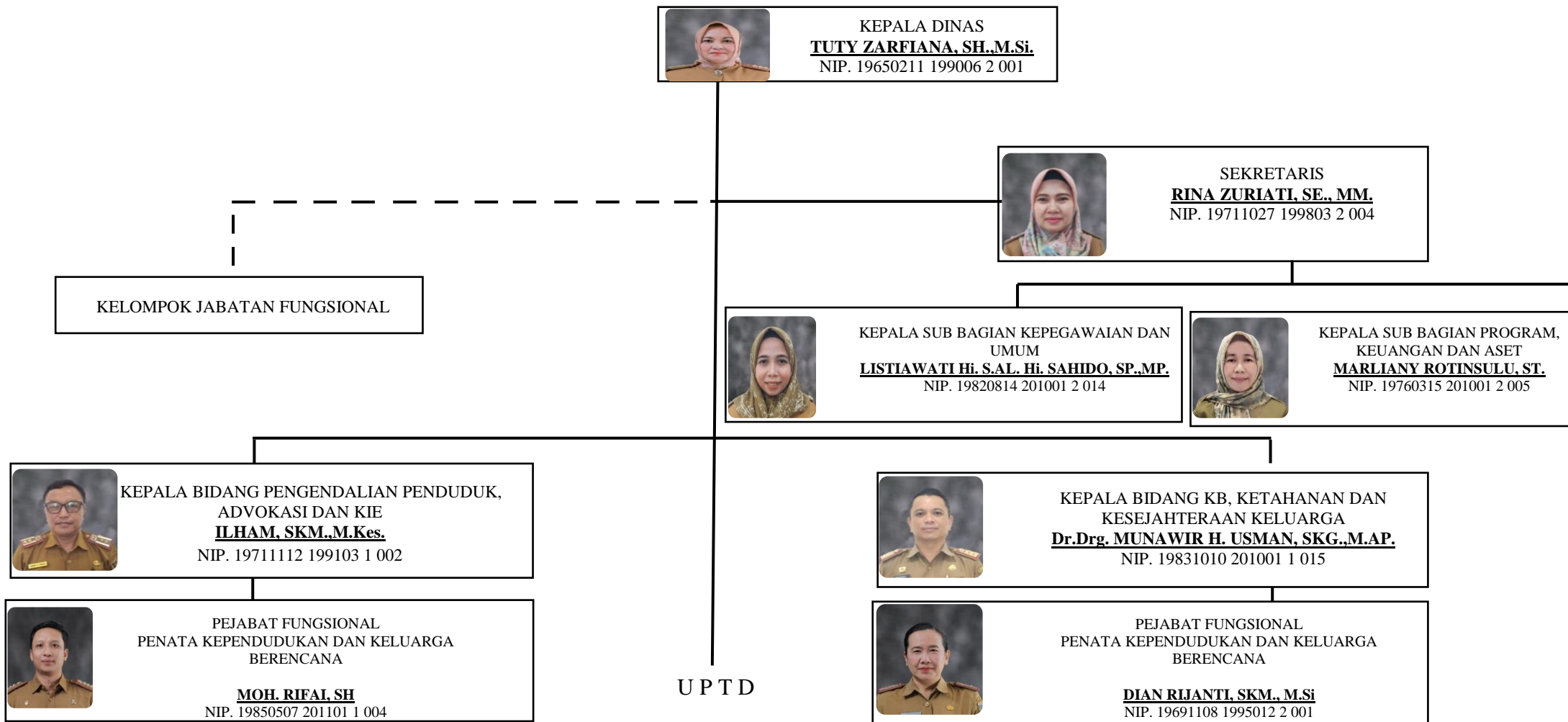
Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi



Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH





2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program OPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2021–2026.

1. Bonus demografi ; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah turun dari 2.71 (SDKI 2017) menjadi 2.61 (SKAP 2019) Pada Tahun 2022 angka Kelahiran Total mencapai 2.43 % di Provinsi Sulawesi Tengah Data BPS.
2. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan



- kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan Perhatian dan intervensi yang tepat;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga; Kebijakan Pembangunan Manusia Dilakukan Berdasarkan Pendekatan Siklus Hidup Dan Inklusif, Termasuk Memperhatikan Kebutuhan Penduduk Usia Lanjut Maupun Penduduk Penyandang Disabilitas. Narasi Ini, Bahkan Akan Lebih Komprehensif Apabila Dimulai Dari Gagasan Perencanaan Dari Tahap Pra Berkeluarga (Perencanaan Kehidupan Berkeluarga), Merencanakan Keinginan Untuk Memiliki Anak Termasuk Jumlah Anak Yang Dikehendaki, Proses Kehamilan Yang Merupakan Fase Yang Juga Penting Dalam Proses Tumbuh Kembang Anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Periode Yang Dimulai Sejak Terbentuknya Janin Dalam Kandungan Hingga Anak Berusia 2 Tahun), Pendidikan Anak Usia Dini (Pra Sekolah) Sampai Dengan Usia Sekolah, Remaja Dengan Berbagai Pendekatannya Dalam Penyiapan Generasi Bangsa Yang Berkualitas Menuju Usia Produktif/Bekerja Serta Perhatian Terhadap Kelanjutusiaan Seluruh Tahapan Kehidupan); dan
 4. Satu Data Kependudukan; Pemerintah Telah Menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia Adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Untuk Menghasilkan Data Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Kebenarannya. Disatu Sisi, Pendataan Keluarga (PK) Yang Menjadi Tugas Dan Kewenangan BKKBN, Harus Dapat Diintegrasikan Dengan Data Sektor Lain, Seperti Sensus Penduduk (SP), Serta Data Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil), Sehingga Dapat Terwujud Satu Data Yang Lengkap Baik Guna Mendukung Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Nasional, Maupun Untuk Mendukung Operasionalisasi Program/Kegiatan Bangsa Kencana Di Lini Lapangan.



5. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di daerah Sulawesi Tengah; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana angka kematian ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan angka kematian bayi (AKB) sebesar 58 per 1.000 kelahiran hidup (BPS 2012). Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional (KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;
6. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4 persen (SKAP 2019). Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda, adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk



jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menysasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

7. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;
8. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Indonesia Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, unmet need terus mengalami



kenaikan yakni pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 9,9 persen (SKAP 2018) menjadi 12,7 persen pada tahun 2019 (SKAP 2019).

9. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia angka prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu mencapai 21,6 persen pada tahun 2022, Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah mencapai 28,2%, angka ini menurun 1,5 % dari tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 21,6 %. Dalam rangka mewujudkan keluarga bebas Stunting untuk Indonesia dan Sulteng Sejahtera dan Maju, Gubernur berkomitmen mendorong kab/kota Se Sulteng berkolaborasi dengan PKK serta instansi terkait agar penanganan Stunting lebih tepat sasaran, lebih akurat, lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga Kesehatan.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pencapaian sasaran OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memahami Rendahnya partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk menggunakan metode KB MKJP sebagai cara untuk mengurangi DO KB dan Kurangnya Advokasi, Promosi penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif serta Kurangnya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan. agar penanganan Stunting lebih tepat sasaran, lebih akurat, lebih efektif dan efisien. Adapun yang dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan pencapaian pelayanan adalah adanya program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan manajemen dan peningkatan pemahaman kualitas hidup diperlukan spirit serta komitmen dan kebersamaan dalam melaksanakan kampanye edukasi publik. Hal ini harus segera dilakukan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju guna meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk dalam percepatan penurunan stunting. dalam gerak cepat penurunan stunting menuju 11% pada tahun 2026. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Sesuai Rapat yang di hadiri oleh stake OPD/Stakeholder terkait di Sulawesi Tengah diantaranya Bappeda, Dinkes, Perwakilan BKKBN, Dinpar, Biro Ekonomi dan Perbankan.



Terdapat 5 pilar yang harus menjadi landasan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting yang teruang pada Pepres No. 72 Tahun 2021 Yaitu :

1. Peningkatan Komitmen dari Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Literasi Masyarakat
3. Konperensi dan Kerepaduan Lintas Sektor
4. Pemenuhan Gizi yang tepat
5. Pengaturan Sistem Pemantauan dan Evaluasi.



TABEL 2. 4
RENCANA REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
SESUAI ARSITEKTUR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar			Rp. 12.707.305.627			
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			64	Rp. 10.597.657.641
2	14	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Piranga Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan, Pengukuran, dan evaluasi	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi yang dihasilkan OPD / Jumlah Dokumen Perencanaan x 100%	Provinsi Sulawesi tengah	100%	Rp. 27.044.650
2	14	01	1.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Tersusunnya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi Sulawesi Tengah,	4 Dokumen	Rp. 27.044.650
2	14	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	Jumlah TLHP yang diselesaikan / Jumlah Total TLHP x 100%		100%	7.840.740.843



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
							Pemeriksaan (TLHP)				
2	14	01	1.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	Provinsi Sulawesi Tengah,	58 Orang	Rp. 6.832.280.843
2	14	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Sulawesi Tengah,	57 Laporan	961.500.000
2	14	01	1.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Provinsi Sulawesi Tengah,	2 Laporan	46.960.000
2	14	01	1.05		Adminidtrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.		100%	172.839.030
2	14	01	1.06	0002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur	Jumlah Aparatur yang tersedia kelengkapan pakaian Dinas	Provinsi Sulawesi Tengah,	99 Aparatur	172.839.030



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	14	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.	Provinsi Sulawesi Tengah,	100%	1.723.145.252
2	14	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Tengah,	8 Paket	176.183.702
2	14	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah,	4 Paket	92.800.000
2	14	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersinkronisasi a Program dan kegiatan urusan P2KB kepada Instansi terkait	Instansi yang tersinkronisasi Program dan Kegiatan urusan P2KB		14 Instansi	Rp. 1.454.161.550
2	14	01	1.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE PERANGKAT DAERAH	100%		166.358.900



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	14	01.	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya		Tersedianya peralatan dan mesin kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin kantor tersedia	Palu	18 Unit	166.358.900
2	14	01	1.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE PERANGKAT DAERAH	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	346.928.966
2	14	01	1.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor setiap bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan setiap bulan	Provinsi Sulawesi Tengah,	12 Laporan	346.928.966
2	14	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara / Jumlah Sarana dan Prasarana Keseluruhan x 100%		100%	Rp. 320.600.000
2	14	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Provinsi Sulawesi Tengah,	17 Unit	195.550.000



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	14	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Provinsi Sulawesi Tengah,	50 Unit	40.050.000
2	14	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Provinsi Sulawesi Tengah,	2 Paket	85.000.000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Dokumen GDPK Kab/Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Dokumen GDPK	Jumlah Kab/Kota yang menyusun Dokumen GDPK / Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah x 100	Provinsi	23%	447.647.450
2	14	02	1.01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang telah melakukan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah Kab/Kota yang Menyusun Kebijakan / Jumlah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah x 100	Provinsi	23%	223.763.700



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK		Teradvokasinya Kab/Kota dalam penyusunan GDPK diKab. Banggai, Kab. Toli-Toli, Kab. Buol, Kab. Bangkep dan Kab.Balut	Jumlah Kab/Kota yang teradvokasi Penyusunan GDPK	diKab. Banggai, Kab. Toli-Toli, Kab. Buol, Kab. Bangkep dan Kab.Balut	5 Kab	174.953.700
2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data kependudukan kampung KB untuk memperkuat integrasi program BANGGA KENCANA dan Sektor lain		Tersinkronisasinya a pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB untuk memperkuat integrasi program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berenca (Bangga kencana) dan sektor lain di Kab. Parigi Moutong, Kab, Poso, Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Buol	Jumlah Kab/Kota yang tersinkronisasikan Pembentukan rumah data kependudukan dikampung KB	Kab. Parigi Moutong, Kab, Poso, Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Buol	4 kab	48.810.000
2	14	02	1	02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Meningkatnya pemetaan Pengendalian Penduduk Kab/Kota	Persentase pemetaan Pengendalian Penduduk Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang akan memetakan Program Bangga Kencana / Jumlah Kab/Kota	Provinsi Sulawesi Tengah	8%	223,883.750



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
							Provinsi Sulawesi Tengah x 100				
2	14	02.1	02	0008	Pemetaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA)		Tersosialisasikan Pemetaan Program Bangga Kencana di kab. Banggai, Kab. Bangkep, Kab. Balut, kab. Parimo, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kota Palu	Jumlah Kab. Kota yang tersosialisasikan Pemetaan Program Bangga Kencana	di kab. Banggai, Kab. Bangkep, Kab. Balut, kab. Parimo, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kota Palu	7 kab/kota	139.459.750
2	14	02	1.02	0010	Penyusunan profil program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA)		Tersosialisasikan nya penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kab. Tojo Una-una)	Jumlah orang yang tersosialisasikan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Kab. Tojo Una-una)	30 Orang yang mewakili petugas lini lapangan	84.424.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Ber-KB	Persentase masyarakat yang terpapar program Bangga Kencana	Jumlah peserta KB aktif/PUS *100 %		61%	682.483.104
2	14	03	1	1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Meningkatnya kesertaan keluarga berencana (KB) di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kab/Kota yang mendapat Advokasi, Komunikasi,	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan	14 Kab/Kota	10%	222.833.654



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keluarga Berencana dan Reproduksi	Sosialisasi, Advokasi dan KIE tentang Keluarga berencana dan Kespro/ Jumlah Seluruh Organisasi Masyarakatn Provinsi X 100 %)			
2	14	03	1.01	0006	Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal		Tersosialisasinya Kesehatan Reproduksi kelompok masyarakat Kab Poso dan buol	Jumlah Kelompok masyarakat yang tersosialisasi	Kab Poso dan buol	10 Kelompok	98.206.704
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi, dan KIE program BANGGA KENCANA		Terjalannya Kerja Sama dengan Mitra Kerja dalam Program Bangga Kencana di kab morowali dan kab tojo unauna	Jumlah kerjasama yang terjalin	kab morowali dan kab tojo una-una	2 kerjasama	95.487.950



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	1	4	0	3	Penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Terpublikasinya Kab/Kota informasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Kab/Kota yang terpublikasi	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	29.139.000
2	14	03	1	02	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		Meningkatnya kesertaan keluarga berencana (KB) di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah	Jumlah Mitra kerja yang aktif / jumlah mitra kerja *100 %		10%	459.649.450
2	14	03	1.02	0001	Peningkatan peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB		Tersosialisasikan nya Organisasi mengenai Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB)	-	3 Organisasi	459.649.450
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Angka Kelahiran pada Remaja	Nilai Angka Kelahiran Remaja	Rasio kelahiran yang terjadi pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun) dalam periode tertentu, kemudian membandingkannya dengan jumlah perempuan dalam kelompok usia		34/1000	979.517.432



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
							tersebut pada waktu yang sama.				
2	14	04	1	01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Remaja yang memiliki pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja Yang Mendapatkan Sosialisasi, Pendampingan dan Perbanyakan Materi Substansi PIK-R / Jumlah Seluruh Remaja Usia (10-18 Th) di Kab/Kota Sasaran X 100%		85%	879.517.550
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga		Tersosialisasinya Kelompok perwakilan masyarakat tentang pembinaan pemahaman keluarga terhadap pentingnya ketahanan dan perencanaan keluarga di Kab. Touna, Kab. Poso dan Donggala	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi tentang pembinaan pemahaman keluarga terhadap pentingnya Ketahanan dan perencanaan Keluarga	Kab.Touna Kab Poso Kab Donggala	600 Orang Perwakilan Kelompok masyarakat yang tersosialisasi	487.918.900
							Terdistribusinya materi Substansi untuk kartu kembang Anak di Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Kab/Kota yang terdistribusi materi kartu kembang Anak	Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah	13 Kab/Kota	



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	14	04	1.01	09	Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)		Tersosialisasinya kelompok masyarakat tentang pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Kab. Morut	Jumlah Kelompok masyarakat yang tersosialisasi	di Kab. Morut	50 perwakilan kelompok masyarakat	61.599.900
2	14	04	1.01	0018	Pengembangan dan perbanyak materi substansi pusat informasi konseling remaja (PIK R), Media Promosi, alat permainan edukatif Remaja dan Dan Sarana Prasarana lainnya yang dibutuhkan		Terdistribusinya materi Substansi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) berupa buku Saku Stunting di Kab.Parimo	Jumlah Kab/Kota yang terdistribusi materi	Kab.Parimo	1 Kab/Kota	30.000.000
2	1	4	0	4	Sosialisasi dan pembinaan remaja tentang Generasi berencana		Tersosialisasinya kelompok remaja tentang Generasi Berencana di Kab.Touna, Kab.Poso dan Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah orang perwakilan remaja yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana	Kab.Touna, Kab.Poso dan Kab. Banggai Kepulauan	150 orang perwakilan remaja	199.999.700
2	1	4	0	4	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana pusat informasi Konseling Remaja (PIK R)		Tersosialisasinya Tangguh bersinar Cegah Nikah dini dan Stunting di Kab. Sigi	Jumlah Kelompok masyarakat yang tersosialisasi	Kab. Sigi	100 orang kelompok masyarakat	49.999.850

TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
2	1	4	0	4	Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi Indeks Pembangunan IPK Keluarga dan Pengembangan indeks pembangunan keluarga (i Bangga) tingkat provinsi dan kabupaten kota		Tersosialisasinya Indeks Pembangunan keluarga (IBANGGA) di Kota Palu	Jumlah Dokumen Masyarakat yang tersosialisasi IBangga Kota Palu	Kota Palu,	50 Orang perwakilan kelompok	Rp. 49.999.200
							Tersinkronisasinya program IBANGGA di Provinsi	Jumlah Dokumen sinkronisasi program IBANGGA yang teradvokasi di Provinsi	Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	
. 0 0 2	1	4	0	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelompok Potensial dalam Pembangunan Keluarga	Persentase Organisasi Masyarakat dan Kelompok Potensial yang meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Kelompok Potensial yang mendapatkan Sosialisasi dan Pendampingan / Jumlah Seluruh Organisasi Masyarakat dan Kelompok Potensial di Kab/Kota Sasaran X 100 %		80%	99.999.882
2	1	4	0	4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan		Terbinanya Kelompok Masyarakat tentang dapur Sehat atasi stunting di Kab sigi	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	di Kab sigi	50 orang perwakilan Kelompok Masyarakat yang terbina	Rp. 99.999.882



TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran				Rencana Tahun 2024	
						Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
										Target	Anggaran
					Keluarga Akseptor (UPPK) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.						
2	1	4	0	4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPK) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.		Terbinanya Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Tri Bina, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) danPemberdayaa n Ekonomi Keluarga diKab.Buol	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat	diKab.Buol	75 orang perwakilan Mitra dan Organisasi Masyarakat	





BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Tahun 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi,
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) kedepan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan



memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensial permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis.

Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai

Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi 2021-2026, dengan uraian sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Renja (Rencan Kerja)

1. Meningkatnya pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga
2. Meningkatnya Ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian keluarga





Tabel . 3.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGE T 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026
1	Meningkatnya Ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian keluarga	Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Keluarga	I-Bangga	52,47	51,49	54,38	52,47	52,5	59,99	63	-	63	-	64	-
2	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	TFR	2,61	2,43	2,60	2,60	2,55	2,16	2,14	-	2,12	-	2,12	-



3.3. Program dan Kegiatan Dinas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan KB .Namun dengan dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berimbas pada perubahan struktur program kegiatan pada tahun anggaran 2024. Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 yang terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dann 28 Sub Kegiatan sesuai Permendagri 900 Tahun 2023, Adapun Program dan Kegiatan prioritas sebagaimana terlampir pada Tabel : 3.3



TABEL 3.3
RENCANA REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar				Rp. 12.707.305.627						
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Rp. 12.707.305.627						
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				Rp. 10.597.657.641						
2	14	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Piranga Daerah			27.044.650	Rp.						
2	14	01	1.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	4	Dokumen	Rp. 27,044,650		4 Dokumen	30.000.000
2	14	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 7.840.740.843					7.870.000.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target		
2	14	01	1.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	58	Orang	Rp. 6.832.280.843		60 Orang/Bulan	6.850.000.000	
2	14	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	3	Dokumen	Rp.961.500.000		3 Dokumen	Rp. 970.000.000	
2	14	01	1.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	2	Laporan	Rp. 46.960.000		1 Laporan	Rp. 50.000.000	
2	14	01	1.05		Adminidtrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
												Rp. 172.839.030				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	14	01	1.06	0002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inderks Profesional ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan ya	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	99	Paket	172.839.030		3 Paket	170.000.000
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai							2 Unit	50.000.000
					Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian									2 Dokumen	Rp.50.000.000
					Monitoirng,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai									1 Dokumen	Rp. 50.000.000
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti dan pelatihan							100 Orang	Rp. 50.000.000
					Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundang- undangan							5 Orang	Rp. 75.000.000
2	14	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	14	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan Perlengkap an Kantor yang di sediakan	Terlaksananya a Administrasi Umum Piranga Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	8	Paket	176.183.702		10 Paket	180.000.000
2	14	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Terlaksananya a Administrasi Umum Piranga Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	4	Paket	92.800.000		3 paket	100.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
2 14 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Piranga Daerah	Kab. Banggai(Luwuk). Kab. Poso,(Poso Kota). Kab. Donggala, (Banawa),Kab. Toli-toli, (Baolan). Kab. Morowali,(bungku tengah). Kab.Bangkep (Tinangkung). Kab, Parimo (Parigi). Kab.Touna (Ampana kota). Kab. Sigi (Sigi biromaru). Kab. Balut (Banggai). Kab.Morut (Petasia), Kota. Palu (Palu timur)	1	Laporan	1.454.161.500		13 Laporan	1.800.000.000
2 14 01 1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang di sediakan							2 Unit	50.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif				
2	14	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Perlatan dan mesin lainnya yang di sediakan	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan	Provinsi Sulawesi Tengah	18	Unit	166.358.900		10 Unit	170.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya								1 unit	100.000.000	
2	14	01	1.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Rp. 346.928.966				
2	14	01	1.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi ,Sumber Daya air dan listrik	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	1	Laporan	346.928.966		3 Laporan	495.011.000
2	14	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp. 320.600.000				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	14	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Presentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	17	Unit	195.550.000			
2	14	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	50	Unit	40.050.000			
2	14	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di Rehabilitasi	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	2	Paket	85.000.000			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							Rp. 447.647.450			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target			
2	14	02	1.01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk												
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Kab/Kota yang teradvokasi Penyusunan GDPK	Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi GDPK	Jumlah Dokumen Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kab.Toli-toli (Baolan), Kab. Morowali Utara(Lembo Raya), Kab. Parigi Moutong (Parigi	3	Kab/kota	Rp.174.953.7 00					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data kependudukan kampung KB untuk memperkuat integrasi program BANGGA KENCANA dan Sektor lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyusun GDPK	Jumlah Advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA) dan sektor lain	Kab. Toli-toli, Kab. Tojo Una-una, Ampana Kota	1	Dokumen	Rp.48.810.000			
2	14	02	1	02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi										
2	14	02.1	02	0008	Pemetaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA)	Jumlah dokumen hasil pemetaan program BANGGA KENCANA	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Bangga Kencana	Kab. Banggai (luwuk), Kab. Poso (Poso Kota), Kab. Tojo Una-Una (Ampana Kota)	3	Dokumen	Rp. 139.459.750			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	14	02	1.02	0010	Penyusunan profil program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA)	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi	Pemysunan profil program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyusun GDPK	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	1	Dokumen	Rp. 84.424.000			
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA							Rp.682.483.104			
2	14	03	1	1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi ,komunnikasi, informasi dan edukasi (KIE)tentang keluarga berencana dan reproduksi	Meningkatnya kesertaan keluarga berencana (KB)di kabupaten /kota di Sulawesi tengah	Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				Rp.222.833.654		4 Dokumen	Rp. 312.944.269



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
2 14 03 1.01 0006	Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Rasio Akseptor KB Aktif, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Meningkatnya jumlah peserta Kb Aktif Perempuan/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-46 (persen), Persentase Kebutuhan Ber Kb yang tidak terpenuhi (Unmet Need), Presentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah dokumen hasil pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Jumlah peserta advokasi dan KIE KB dan Kespro serta Provider yang memahami promosi KIE dan KB	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	2	Kelompok	Rp.98.206.704		1 Dokumen	Rp. 312.944.269



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2 14 03 1.01 0010	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi, dan KIE program BANGGA KENCANA	Rasio Akseptor KB Aktif, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Meningkatnya jumlah peserta Kb Aktif Perempuan/CPD bagi Perempuan Menikah Usia 15-46 (persen), Persentase Kebutuhan Ber Kb yang tidak terpenuhi (Unmet Need), Presentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah fasilitasi kerja sama dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Kerjasama	Kab. Morowali (Bungku Tengah), Kab. Tojo Una-una (Ampana Kota)	2	dokumen	Rp.95.487.950		3 daerah	150.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	1	4	0	3	Penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio Akseptor KB Aktif, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Meningkatnya jumlah peserta Kb Aktif Perempuan/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-46 (persen), Persentase Kebutuhan Ber Kb yang tidak terpenuhi (Unmet Need), Presentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE program pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta advokasi dan KIE KB dan Kespro serta Provider yang memahami promosi KIE dan KB	Provinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Lolu selatan	2	Media Massa	Rp. 29.139.000		3 Laporan	35.000.000
2	14	03	1	02	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
2 14 03 1.02 0001	Peningkatan peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Rasio Akseptor KB Aktif, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Meningkatnya jumlah peserta Kb Aktif Perempuan/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-46 (persen), Persentase Kebutuhan Ber Kb yang tidak terpenuhi (Unmet Need), Presentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah organisasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Tojo Una-una, Kab. Morowali Utara	3	Organisasi	Rp. 459.649.450		4 Organisasi	Rp. 575.000.000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
2 14 04 1 01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
2 14 04 1.01 03	Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-49 tahun (ASFR), angka kelahiran menurut kelompok umur per seribu PUS	Jumlah dokumen hasil pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Tribina dan pik remaja serta desa lokus stunting yang mendapat	Kab. Poso (Poso Kota), Kab. Donggala (Banawa), Kab. Tojo una-una (Ampana Kota)	1	Dokumen	Rp. 487.918.900		1 Dokumen	Rp. 75.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
								pembinaan dan pendidikan ketahanan keluarga							
2	14	04	1.01	09	Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15- 49 tahun (ASFR), angka kelahiran menurut kelompok umur per seribu PUS	Jumlah kelompok tribina dan PIK R serta desa lokus stunting yang mendapat pembinaan dan pendidikan ketahanan keluarga	Tersedianya kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bohue	1	DOKU MEN	Rp. 61.599.000		2 dokumen	Rp. 75.000.000
2	14	04	1.01	0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Menuju Keluarga Berkualitas							80 Keluarga	Rp. 100.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
2 14 04 1.01 0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK									3 Dokumen	Rp. 100.000.000
2 14 04 1.01 0018	Pengembangan dan perbanyak materi substansi pusat informasi konseling remaja (PIK R), Media Promosi, alat permainan edukatif	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15- 49 tahun (ASFR), angka kelahiran menurut kelompok umur per seribu PUS	Jumlah kelompok tribina dan PIK R serta desa lokus stunting yang mendapat pembinaan dan pendidikan ketahanan keluarga	Jumlah dokumen Pengembang an dan perbanyak materi substansi pusat informasi konseling remaja (PIK R), Media Promosi, alat permainan edukatif remaja, dan sarana pra sarana lainnya yang di butuhkan	Kab. Poso, Poso Kota	20	Kelompo k	Rp.30.000.000		1 Dokumen	50.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	1	4	0	4	Sosialisasi dan pembinaan remaja tentang Generasi berencana	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-49 tahun (ASFR), angka kelahiran menurut kelompok umur per seribu PUS	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana	Jumlah kelompok tribina dan PIK R serta desa locus stunting yang mendapat pembinaan dan pendidikan ketahanan keluarga	Kab. Poso (Poso Kota), Kab. Toli-toli (Baolan), Kab. Parimo (Parigi), Kab. Tojo una-una (Ampana Kota, ampama), Kab. Sigi (Biromaru, kalukubula)	25	kelompok	Rp. 199.999.700		30 Kekompok	100.000.000
2	1	4	0	4	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana pusat informasi Konseling Remaja (PIK R)	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-49 tahun (ASFR), angka kelahiran menurut kelompok umur per seribu PUS	Jumlah kelompok PIK R yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana pusat informasi (PIK R)	Jumlah kelompok tribina dan PIK R serta desa locus stunting yang mendapat pembinaan dan pendidikan ketahanan keluarga	Kab. Donggala, Banawa, Gunung Bale	20	kelompok	Rp. 49.999.850		30 Kekompok	100.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	1	4	0	4	Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga dan Pengembangan indeks pembangunan keluarga (i Bangsa) tingkat provinsi dan kabupaten kota	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15- 49 tahun (ASFR), angka kelahiran menurut kelompok umur per seribu PUS	Jumlah laporan Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi Indeks Pembanguna n Keluarga dan Pengembang an indeks pembanguna n keluarga (i Bangga) tingkat provinsi dan kabupaten kota	Jumlah kelompok tribina dan PIK R serta desa lokus stunting yang mendapat pembinaan dan pendidikan ketahanan keluarga	Kota Palu, Palu Timur, Lolu selatan	20	Kelompo k	Rp. 49.999.200		2 Daerah	75.000.000
					Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (indeks Pembangunan Keluarga		Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian I Bangga9 Indeks Pembanguna n Keluarga)							13 Daerah	100.000.000
.	1	4	0	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga										



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
										Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	
2	1	4	0	4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPK) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-49 tahun (ASFR)	Jumlah mitra dan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan keluarga melalui bina keluarga balita (BKB),bina keluarga Remaja (BKR) , bina Keluarga Lansia (BKL) usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah dokumen atau laporan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga	Provinsi Sulawesi Tengah ,Kecamatan Biau, keluarahan kulango	10	Organisasi	Rp. 99.999.882			
2	14	04	1.02	0001	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-49 tahun (ASFR)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui pusat pelayanan keluarga					2 Dokumen	Rp. 100.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
						Target	Volume	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target				
				sejahtera (PPKS)										
2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-49 tahun (ASFR)		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)					1 Laporan	Rp. 66.999.685



TAHUN 2024

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P2KB)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA					
				Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	TFR	2,61	2,43	2,6	2,6	2,55	2,16
2	Meningkatnya Ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian keluarga	Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Keluarga	I-Bangga	52,47	51,49	54,38	52,47	52,5	59,99



**REALISASI CAPAIAN PROGRAM IPPD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Perangkat Daerah	Program	Indikator	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Perubahan Target 2023	Capaian 2023	Perubahan Target 2024	Keterangan Ketercapaian 2022 (Tercapai =1, Tidak Tercapai = 0)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	62		66,50		68,50	0
	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang Menyusun GDPK	Jumlah	1	1	1		3	1
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)								
		Rasio akseptor KB	Angka	62,00	60,38	63	68,07	65	0
		Angka pemakaian kontrasepsi/	%	60,00 (57)	59.91	61	67,78	63	0



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Perubahan Target 2023	Capaian 2023	Perubahan Target 2024	Keterangan Ketercapaian 2022 (Tercapai =1, Tidak Tercapai = 0)
		CPR bagi perempuan menikah usia 15-49							
		Porsentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need)	Porsen	14	27,93	13,99	15,6	13,97	
		Porsentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Porsen	16	23,33	19	19	23	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate /ASFR)	Angka	50/1000	36/1000	36/1000	33,5/1000	34/1000	1



CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA TAHUN 2022-2025

NO	OPD	SASARAN RENSTRA	TARGET 2022 Sebelum Perubahan	TARGET 2022 FIKS	CAPAIAN 2022	TARGET 2023 Sebelum Perubahan	TARGET 2023 FIKS	CAPAIAN 2023	TARGET 202 Sebelum Perubahan	TARGET 2024 FIKS
		Rasio akseptor KB		62,00	60,38		63			
2	P2KB	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	75,40	57	59,5	75,50	60	67,78	75,60	61
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,60	2,61	2,32	2,55	2,55	2,16	2,50	2,50
		Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need)	14,63	14	27,93	14,54	13,99	15,6	14,47	13,98



TAHUN 2024

		Meningkatnya Pemakaian Metode Contraespsi Jangka Panjang (MKJP)	13,35	16	23,33	13,55	19	28,2	13,60	23
		Menurunnya Angka Kelahiran Remaja (ASFR)	50/1000	50/1000	36/1000	49/1000	36/1000	33,5/1000	47,5/1000	34/1000





TAHUN 2024
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2023				
									Target	Rp			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih		2	14				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.807.184.712	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	%	10.594.896.362		
		2	14	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		76	%	29.965.650		
		2	14	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.916.900		
		2	14	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dokumen	14.999.850		



TAHUN 2024

		2	14	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	2	Dokumen	3.000.000		
		2	14	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	10.048.900		
		2	14	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	64		7.316.544.712		
		2	14	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	64	Orang	6.367.184.712		
		2	14	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	Dokumen	906.060.000		
		2	14	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	43.300.000		
		2	14	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	64	%	208.575.000		
		2	14	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	101.040.000		



TAHUN 2024

		2	14	01	1,05	05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	Dokumen	53.035.000		
		2	14	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi pengaturan Perundang-undangan.	Jumlah org yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi pengaturan Perundang-undangan.	4	Orang	54.500.000		
		2	14	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	64	%	1.511.862.245		
		2	14	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	67.430.595		
		2	14	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistic kantor yang di sediakan	3	paket	196.520.000		
		2	14	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	Paket	36.414.750		
		2	14	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	laporan	1.211.496.900		
		2	14	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64	%	714.000.000		



TAHUN 2024

			2	14	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara	100	unit	714.000.000		
			2	14	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64	%	510.078.755		
			2	14	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	349.861.400		
			2	14	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	1	Laporan	160.217.355		
			2	14	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64	%	303.870.000		
			2	14	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	276.000.000		
			2	14	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	unit	27.870.000		



TAHUN 2024

Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Kab/Kota yang menyusun GDPK	1	Kab/Kota	825.588.400		
		2	14	02	1,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2	Dok	363.508.900		
		2	14	02	1,01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	Laporan	203.766.600		
		2	14	02	1,01	11	Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK dan sector lain.	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah data kependudukan di kampung Kb .	1	dokumen	159.742.300		
		2	14	02	1,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	3	Dok	462.079.500		



TAHUN 2024

		2	14	02	1,02	03	Pemetaan program kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembanguana n Keluarga	Jumlah dokumen hasil Pemetaan program kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembanguana n Keluarga	1	dokumen	245.000.000		
		2	14	02	1,02	06	Penyusunan Profil kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Profil kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	dokumen	119.890.000		
		2	14	02	1,02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggara an Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1	Dokumen	97.189.500		
Meningkatkan kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Ketentraman Keluarga • Meningkatkan Kualitas Kemandirian Keluarga • Meningkatkan Kualitas Kebahagiaaa n Keluarga 						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Ketentraman ▪ Indeks Kemandirian ▪ Indeks Kebahagiaaa n 		55,73				
		2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100	%	800.038.350		



TAHUN 2024

Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana	2	14	03	1,01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio Akseptor KB			444.212.750		
	2	14	03	1,01	03	Penggunaan Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	Jumlah laporan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	77	laporan	78.017.150		
	2	14	03	1,01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	14	Dokumen	110.501.050		



TAHUN 2024

		2	14	03	1,01	06	Pengembangan strategi Operasional promosi dan konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen hasil pengembangan strategi Operasional promosi dan konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	14	dokumen	162.472.700		
		2	14	03	1,01	08	Pembinaan promosi dan konseling kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen/ laporan	14	Laporan	93.221.850		
		2	14	03	1,02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Angka Pemakaian Kontrasepsi / mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49(Persen)	100	%	355.825.600		
		2	14	03	1,02	01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Dokumen	231.624.950		



TAHUN 2024

		2	14	03	1,02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Organisasi	124.200.650		
Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital		2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	%	1.586.661.600		
	Terwujudnya pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.	2	14	04	1,01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi/ Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	1.199.556.500		
		2	14	04	1,01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	114.265.000		
		2	14	4	1	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13	Dokumen	211.144.850		



TAHUN 2024

		2	14	4	1	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	500	Orang/ kelompok	87.500.000		
		2	14	4	1	05	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1	Laporan	128.552.700		
		2	14	4	1	06	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Inforamsi dan Konseling Remaja (PIK/ R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	50	Organisasi	51.912.350		
		2	14	4	1	09	Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhah 1000 hari pertama kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	2	Dokumen	51.699.800		
		2	14	4	1	10	Sub. Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang mendukung tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokumen	49.521.800		



TAHUN 2024

		2	14	4	1	11	Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokumen	50.730.000		
		2	14	4	1	12	Sub. Kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi IPK	13	Laporan	57.170.050		
		2	14	4	1	14	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	jumlah kelompok masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan, bimbingan 1000 HPK	13	Dokumen	48.539.950		
		2	14	4	1	15	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	unit	348.550.000		
		2	14	04	1,02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100	%	387.105.100		



TAHUN 2024

		2	14	04	1,02	01	Sub. Kegiatan Pengelola Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PKKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Dokumen	132.700.200		
		2	14	04	1,02	02	Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	laporan	69.408.100		
		2	14	04	1,02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1	Laporan	57.496.000		
		2	14	04	1,02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	1	Dokumen			



TAHUN 2024

								Ekonomi Keluarga					
		2	14	04	1,02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	Dokumen	27.500.750		







BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Selain itu, Renja-OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Renja-OPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ; c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; dan d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.



5.3. Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja-OPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan K/L/D/I maupun OPD yang membidangi fungsi lain.